

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ayatrohaedi, Tawalinuddin Haris, dan Sri Sutjainingsih, 1994, *Kumpulan Buklet Hari Bersejarah II*, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta
- Binoto Nadapdap, 2010, *Menakar Besaran Honorarium Advokat (Panduan Umum Bagi Konsumen)*, Permata Aksara.
- Buaton, Tiarsen, 2016, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan, Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Kemang, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence M, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. Diterjemahkan oleh M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media, Bandung.
- Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damera Press, Jakarta.
- Karso, A. Junaedi, *Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan*, Samudra Biru, Yogyakarta
- Kelsen, Hans, 2017, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Problematisa Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia cetakan pertama juli 2014.
- Krisnayuda Backy, 2016, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 1999, *Himpunan Surat Petunjuk Mahkamah Agung RI dan Instruksi Mahkamah Agung RI Dari Tahun 1951 s.d 1994*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Mahkamah Agung RI, 2008, *Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer*, Buku II Edisi 2007.

- Marmudji, Sri, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2020, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Nonet, Phillipe dan Philip Selznick, 2001, *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition*, New Brunswick, Nj Transaction Publisher, (terj. Rafael Edy Don Bosco, 2003, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, Ford Foundation, Jakarta)
- Pamuji, Kadar, dkk, 2023, *Hukum Administrasi Negara*, Unsoed Press, Purwokerto.
- Pramono, Budi, 2025, *PERADILAN MILITER INDONESIA: Telaah Historis, Yuridis, dan Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, CV Aksara Global Akademia, Jawa Barat.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Genta, Yogyakarta.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Reksodiputro, Mardjono, 1999, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah, 2019, *Hukum Peradilan Militer*, CV Anugrah Utama, Lampung.
- Salam Moch. Faisal, 1996, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

- Salam, Moch Faisal, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Shalihah, Fithriatus, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Cetakan ke-1 Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sidiq, Umar dan Moh Miftachul Choiri, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, CV Nata Karya, Ponorogo.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.
- Sriwidodo, Joko, 2020, *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta
- Sriwidodo, Joko, 2023, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Kepel Press, Yogyakarta
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2021, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Supriyatna, 2015, *Kamus Hukum Militer*, Babinkum TNI, Jakarta.
- Taufiq, Muhammad, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin, 2007, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Walidin, Warul, *et.al*, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, FTK Ar-Raniry Press, Banda Aceh

Wibowo, Basuki Rekso, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung

Winarta, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex media Komputindo, Jakarta.

Yanto, Oksidelfa, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

YLBHI dan PSHK, 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Sentralisme Production, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1089/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pegawai Negeri atau Anggota Militer yang Melakukan Pekerjaan Sebagai Pembela/Penasihat Hukum di Muka Pengadilan.

### C. Jurnal

Al Kautsar, Izzy dan Danang Wahyu Muhammad, 2022, *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial*, Jurnal Sapientia et Virtus Vol 7 Nomor 2

Amalia, Firda dan Irwan Triadi, 2025, *Peran Peradilan Militer Dalam Menegakkan Disiplin dan Hukum di Lingkungan TNI*, Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3 No 3, Juni 2025.

Chandra, Rinaldi, 2018, *“Penyelesaian Kasus Hukum di Lingkungan Pengadilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Anggota TNI”*, Jurnal hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Pamulang Law Review Vol 1 No 2 November 2018, Tangerang.

Flora, Henny Saida, 2022, *Kewenangan Peradilan Militer Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional*, Fiat Iustitia Jurnal Hukum Vol 2 No 2 Maret 2022, Medan

Helmi, Muhammad Ishar, 2013, *“Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Militer”*, Jurnal Cita Hukum Vol 1 No 2 November 2013, Tangerang

Hutapea, Tumbur Palti D, 2016, *“Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya”*, Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI, Vol 5 No 3 November 2016, Jakarta.

Laia, Sri Wahyuni dan Sodialman Daliwu, 2022, *Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia*, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol 10 No 1 Januari 2022

Laksmidewi, Ni Luh Ayu Widhiarcani dan Ni Nengah Adiyaryani, 2024, “*Kekhususan dalam Tahapan Penyerahan Perkara di Peradilan Militer*”, *Jurnal Pemuliaan Keadilan Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol 1 No 4 Oktober 2024, Bali.

Lubis, Marzuki, 2014, *Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional*, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.1 No.1 Juni 2014.

Putra, Irman dan Arief Fahmi Lubis, 2019, “*Pemberian Bantuan Hukum Bagi Prajurit TNI dan PNS TNI sebagai Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia*”, *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta* Vol 01 No 1 Agustus 2019, Jakarta.

Rengrengulu David Masaluri, dkk, 2025, *Eksistensi Advokat Bagi Korban Dalam Peradilan Militer*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura* Vol 3 No 1 April 2025, Ambon.

#### **D. Tesis**

Rahayuningsih, Toetik, 2002, “*Peradilan Militer di Indonesia dan Pengakan Hukum Terhadap Pelakunya*”, *Dik Rutin* Lembaga Penelitian Universitas Airlangga November 2002, Surabaya.

Setyadi, Niko Bobi, 2012, “*Eksistensi Perwira Penyerah Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Militer*”, *Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*.

Setyo, Agung Rochmad, 2017, “*Optimalisasi Tugas Penasehat Hukum Militer Dalam Pemberian Bantuan Hukum dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Prajurit (Studi di Kumdam V/Brawijaya Jawa Timur)*”, *Tesis Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*.

#### **E. Internet**

Berita Tempo Plus, “*Antara Lautze dan Den Haag*”, <https://www.tempo.co/arsip/antara-lautze-dan-den-haag--1024387>, diakses pada tanggal 09 Februari 2025.

Ceklis Satu, *Ungkap Fakta Sebenarnya, Kuasa Hukum Mantan Kepala Basarnas Blak-blakan*, <https://ceklissatu.com/news/ungkap-fakta-sebenarnya-kuasa-hukum-mantan-kepala-basarnas-blak-blakan>, diakses pada tanggal 13 Juli 2025

Faharuddin, Rahmansyah, *Pustrajak Kumdil MA Gelar Diskusi Pembaharuan Hukum Acara Pidana Militer*, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pustrajak-kumdil-ma-gelar-diskusi-pembaharuan-hukum-pidana-0o7> diakses pada tanggal 14 Oktober 2025.

Hukum Online, “Buyung:Tindakan TNI di Timtim karena Policy”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/buyung-tindakan-tni-di-timtim-karena-policy-hol690/>, diakses pada tanggal 01 Maret 2025

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 66-K/PMII-11/AD/VII/2015*, tanggal 3 Desember 2015, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, diakses pada 10 Juli 2025, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025* (2025), dari situs Mahkamah Konstitusi [https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_13\\_171\\_1758096908.pdf](https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13_171_1758096908.pdf) diakses pada tanggal 15 Oktober 2025

Markas Besar Angkatan Darat Dinas Psikologi, *Sapta Marga*, <https://www.dispsiad.mil.id/norma/sapta-marga>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2025.

Markas Besar Angkatan Darat Dinas Psikologi, *Sumpah Prajurit*, <https://www.dispsiad.mil.id/norma/sumpah-prajurit>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2025

Mawangi, Genta Tenri, *Kababinkum: TNI Dapat Beri Bantuan Hukum Prajurit dan Keluarga*, <https://www.antaraneews.com/berita/3675519/kababinkum-tni-dapat-beri-bantuan-hukum-prajurit-dan-keluarga> diakses tanggal 12 Oktober 2025.